

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu yang termasuk negara berkembang yakni Indonesia, dimana bisa dilihat pemerintah selalu berupaya melakukan pembangunan yang merata disetiap wilayah, yaitu melakukan pembangunan prasarana seperti jalan raya, sekolah, rumah sakit, jembatan dan masih banyak lagi. Pelaksanaan pembangunan pemerintah memerlukan biaya banyak. Asal penerimaan pemerintah salah satunya yang bisa memberikan andil pada pendanaan pembangunan ialah pajak. Undang-Undang (UU) No. 28 Tahun 2007 mengatakan bahwa pajak ialah kewajiban untuk negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat wajib berdasar pada UU, tanpa peroleh balasan langsung dan dipergunakan untuk kepentingan negara serta kesejahteraan masyarakat.

Sistem perpajakan yang dijalankan di Indonesia ialah *self assessment system* yakni pemberian wewenang menyeluruh ke wajib pajak untuk melakukan segala aktivitas perpajakannya yang meliputi perhitungan, pembayaran atau penyetoran serta pelaporan yang dilakukan sendiri terkait besaran pajak yang terutang, berdasar periode waktu yang sudah ditetapkan regulasi UU perpajakan (Subarkah & Dewi, 2017 : 64).

Masyarakat yang sudah mempunyai penghasilan bisa melakukan pendaftaran jadi wajib pajak (WP) dan akan peroleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) namun tidak taat untuk melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan, maka tingkatan kepatuhan WP yang rendah akan menimbulkan

pemasukan yang rendah. Sebab itu, harapannya agar masyarakat lebih menyadari pentingnya membayar pajak agar pendapatan negara meningkat.

Berikut data periode 2016 – 2020 WP terkait tingkatan kepatuhan WP di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batam Selatan, yakni:

Tabel 1.1 Kepatuhan WP DJP

Periode	WPOP Terdaftar	SPT Dilaporkan	SPT Tidak Dilaporkan	Kepatuhan
2016	257.789	58.374	6.918	89%
2017	268.982	49.849	7.294	87%
2018	283.327	44.981	5.099	89%
2019	295.043	48.451	6.162	88%
2020	346.894	47.242	6.960	87%

Sumber: KPP Pratama Batam Selatan, 2021

Berdasar perolehan data pada tabel 1.1 bisa ditinjau pada 2016 wajib pajak yang terdaftar 257.789, melaporkan SPT 58.374 dan tidak melaporkan SPT 6.918 sehingga tingkat kepatuhan sebesar 89%, dan periode 2017 WP terdaftar mengalami kenaikan jadi 268.982 yang melaporkan SPT sebanyak 49.849 dan yang tidak melaporkan SPT sebanyak 7.294 akan tetapi tingkat kepatuhannya menurun menjadi 87%, dan pada tahun 2018 wajib pajak terdaftar 283.327, melaporkan SPT 44.981 dan tidak melaporkan SPT 5.099 sehingga tingkat kepatuhan meningkat menjadi 89%, dan pada tahun 2019 wajib pajak yang terdaftar mengalami peningkatan menjadi 295.043 dan yang melaporkan SPT meningkat menjadi 48.451 dan yang tidak melaporkan SPT meningkat menjadi 6.162 sehingga kepatuhan wajib pajak juga menurun menjadi 88%, dan pada tahun 2020 wajib pajak yang terdaftar mengalami peningkatan menjadi 346.894 akan tetapi yang melaporkan SPT menurun menjadi 47.242 dan yang tidak

melaporkan SPT mengalami peningkatan menjadi 6.960 sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak menurun menjadi 87%.

Dari pemaparan tabel diatas dapat diketahui bahwa kepatuhan WP dalam melaporkan pajak tergolong rendah, sedangkan WP orang pribadi (WPOP) yang terdaftar setiap tahun meningkat, dan banyaknya WPOP yang terdaftar bukan menjadi suatu jaminan tingkat kepatuhan juga akan mengalami peningkatan. Motivasi bisa menyumbang pengaruh kepatuhan WP. Motivasi bisa memberikan pengaruh yang positif pada kepatuhan dalam membayar pajak (Ikaraini & Adnantara, 2021: 168). Apabila masyarakat punya rasa dorongan yang tinggi untuk memenuhi kewajibannya dalam pembayaran pajak, pembangunan Indonesia bisa secara tidak langsung akan berlangsung sinkron dengan yang diharapkan, apabila masyarakat memiliki motivasi yang rendah untuk pemenuhan kewajibannya membayar pajak, bisa diperkirakan pembangunan akan terkendala.

Adanya agenda sosialisasi bisa berguna untuk salah satu cara memberi pengaruh kepatuhan WP. Sosialisasi ada dampak positif pada kepatuhan WP, dilakukannya sosialisasi secara teratur bisa tingkatkan kepatuhan WP pula maka akan makin mengalami peningkatan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan (Faris Naufal & Setiawan, 2018 : 265).

Pemahaman terkait perpajakan bisa jadi salah satu aspek dalam pemenuhan kepatuhan WP, pemahaman perpajakan ada dampak positif pada kepatuhan WP, dengan demikian makin tinggi pemahaman perpajakan maka kepatuhan WP juga akan mengalami peningkatan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Faris Naufal & Setiawan, 2018 : 266).

Berdasar penjelasan pemaparan yang sudah dilakukan sebelumnya, penulis punya ketertarikan melakukan riset dengan pengambilan judul “**ANALISIS PENGARUH MOTIVASI, SOSIALISASI DAN PEMAHAMAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KPP PRATAMA BATAM SELATAN**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasar pada permasalahan yang dijelaskan, diperoleh identifikasi permasalahan yakni:

1. Motivasi WP yang masih rendah dalam membayar pajak.
2. Masih kurangnya sosialisasi efektif sehingga WP mengalami kesulitan dalam memenuhi perpajakannya.
3. Pemahaman WP tentang perpajakan yang masih kurang.

1.3 Batasan Masalah

Berdasar penjelasan latar permasalahan serta identifikasi yang ada, bisa didapatkan batasan masalah riset ini yakni sebagai berikut:

1. WP yang terlibat yakni WPOP.
2. Objek riset yang dipergunakan ialah KPP Pratama Batam Selatan.

1.4 Rumusan Masalah

Setelah dilakukannya penjelasan permasalahan riset tersebut, bisa diperoleh rumusan permasalahan riset yakni:

1. Apakah motivasi berpengaruh pada kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan?

2. Apakah sosialisasi berpengaruh pada kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan?
3. Apakah pemahaman WP berpengaruh pada kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan?
4. Apakah motivasi, sosialisasi, dan pemahaman WP berpengaruh pada kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasar penjelasan rumusan permasalahan, bisa didapatkan arah riset yakni untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui apakah motivasi berpengaruh pada kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan.
2. Untuk mengetahui apakah sosialisasi berpengaruh pada kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan.
3. Untuk mengetahui apakah pemahaman wajib pajak berpengaruh pada kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan.
4. Untuk mengetahui apakah motivasi, sosialisasi, dan pemahaman wajib pajak berpengaruh pada kepatuhan WPOP di KPP Pratama Batam Selatan.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Berikut terdapat penjelasan fungsi secara teoritis pada riset ini yakni:

1. Bagi penulis, memberikan tambahan literatur pandangan atau argumen terkait pengetahuan peran penting motivasi, sosialisasi, dan pemahaman WP guna dilakukannya peningkatan kepatuhan WP dalam pembayaran pajak.

2. Bagi peneliti selanjutnya, harapannya bisa memberi tambahan sumber literatur untuk dilakukan riset selanjutnya.

1.6.2 Manfaat Praktis

Berikut ada fungsi secara praktis dari riset ini yakni:

1. Bagi KPP pratama batam selatan, perolehan hasil riset ini harapannya bisa memberi partisipasi berupa masukan pada parameter aspek-aspek yang bisa memberi pengaruh perpajakan.
2. Bagi WP, harapannya bisa menjadi tambahan pengetahuan terkait peran penting motivasi, sosialisasi, dan pemahaman WP guna peningkatan kepatuhan WP dalam pertumbuhan perkembangan ekonomi di Indonesia.